

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah salah satu komponen fundamental dalam konteks pembangunan nasional, yang didasarkan pada prinsip otonomi daerah. Prinsip ini memberikan peluang untuk meningkatkan demokrasi, memperbaiki kinerja pemerintahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan dapat ditinjau melalui indikator pertumbuhan ekonominya. Maka dari itu, setiap wilayah berusaha menentukan sasaran pertumbuhan ekonomi setinggi mungkin, karena hal tersebut menjadi faktor penting dalam menjamin keberlanjutan proses pembangunan ekonomi (Darma & Wulansari, 2021). Pertumbuhan ekonomi dapat mendukung kelancaran proses pembangunan ekonomi, sementara pembangunan ekonomi juga berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Karmeli *et al.*, 2021).

Lebih lanjut, Budihardjo *et al.*, (2020) memaparkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi stabil dan menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya mencerminkan adanya peningkatan kesejahteraan di suatu daerah, dan sebaliknya ketika pertumbuhan ekonomi menurun menunjukkan bahwa adanya penurunan tingkat kesejahteraan. Dalam kerangka teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik menekankan bahwasanya, pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah mempunyai kaitan yang erat dengan pertumbuhan output barang dan jasa, yang mampu dinilai berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB ini menjadi indikator yang mencerminkan tingkat kemajuan pembangunan di wilayah tersebut.

Setiap daerah di Indonesia memiliki kondisi demografi yang beragam, meliputi aspek sumber daya alam, ekonomi, sosial, serta budaya, yang dapat menyebabkan perbedaan tingkat kemajuan antar daerah. Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sedang berkembang dengan nilai pertumbuhan ekonominya paling rendah di Sumatera pada triwulan 1-2025 berdasarkan publikasi resmi Badan Pusat Statistik. Semakin pesat pertumbuhan PDRB suatu wilayah, semakin besar pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi nasional. Berikut tabel kondisi nilai PDRB atas dasar harga diberlakukan di

Provinsi Jambi dan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia selama periode tahun 2010-2024

Tabel 1. 1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)_{ADHB} Provinsi Jambi dan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia

Tahun	PDRB Provinsi Jambi (Triliun Rupiah)	PDB Indonesia (Triliun Rupiah)
2010	90.618,41	6.864.133,10
2020	205.081,99	15.443.353,20
2021	232.294,20	16.976.751,40
2022	276.719,40	19.588.459,90
2023	293.729,30	20.892.348,50
2024	322.975,53	22.138.964,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Pada tabel 1.1 memperlihatkan bahwasanya PDRB_{ADHB} Provinsi Jambi selama periode tahun 2010 hingga 2024 kecenderungan mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 PDRB_{ADHB} Provinsi Jambi memberikan kontribusi sebesar 1,32 persen terhadap PDB Indonesia. Tahun 2020, PDRB Provinsi Jambi hanya memberikan kontribusi sejumlah 1,34 persen terhadap PDB dikarenakan pandemi COVID-19 yang melumpuhkan berbagai aktivitas ekonomi. Pada tahun 2021 keadaan ekonomi Provinsi Jambi mulai pulih dengan kontribusi sebesar 1,37 persen. Tren pertumbuhan ini berlanjut pada tahun 2022 dan 2023, di mana kontribusi naik menjadi 1,41 persen. Di 2024, PDRB Provinsi Jambi kembali meningkat, melalui kontribusi sebesar 1,46 persen. Meskipun kontribusi PDRB Provinsi Jambi terhadap PDB nasional relatif kecil, namun jika pemerintah Provinsi Jambi memahami dan mengelola ekonomi wilayahnya dengan dengan baik dan efisien, maka nilai PDRB tersebut akan meningkat. Karena itu, diperlukan fokus khusus dalam upaya meningkatkan taraf perekonomiannya.

Pertumbuhan ekonomi, selain ditentukan oleh faktor ekonomi, namun juga oleh faktor non-ekonomi yang salah satunya yaitu faktor kependudukan. Dalam kerangka pembangunan, baik di tingkat daerah ataupun nasional, penekanan pada faktor kependudukan sangat penting karena penduduk menjadi fokus utama berbagai kebijakan serta program pembangunan. Dalam proses pembangunan, penduduk dapat berperan sebagai subjek yaitu penyedia tenaga kerja ataupun

sebagai objek yaitu sebagai konsumen yang membeli barang dan jasa. Kedua, kondisi kependudukan memiliki dampak yang kuat pada dinamika pembangunan yang dilakukan pemerintah (Firdausi, 2020).

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor kependudukan yang memengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Darma & Wulansari, (2021), Salsabila *et al.*, (2021), Yuniarto, (2021), dan Raskina & Saharuddi (2023) menemukan bahwasanya faktor kependudukan yang memengaruhi PDRB adalah jumlah penduduk. Kemudian penelitian Ananda *et al*, (2020), Yuniartika *et al*, (2020), Utami *et al*, (2021), Saputra & Kusumastuti, (2023), serta Isnaini dkk, (2023) menemukan bahwa tenaga kerja merupakan faktor kependudukan yang berperan penting dalam mendorong Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada suatu wilayah.

Penelitian oleh Simangunsong, (2024), Asmoro *et al.*, (2022), Arifin & Fadllan, (2021), menemukan bahwa indeks pembangunan manusia merupakan faktor kependudukan yang dapat memengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada suatu wilayah. Penelitian oleh Ginting *et al.*, (2020), Bidisha *et al.*, (2020), Yusuf *et al.*, (2020), dan Isnaini *et al*, (2023), menemukan faktor kependudukan yang dapat memengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah *dependency ratio*. Kemudian penelitian oleh Firdausi, (2020), dan Asnidar *et al.*, (2022) menemukan faktor yang memengaruhi itu adalah *sex ratio*.

Berdasarkan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan menggunakan faktor-faktor kependudukan yang memengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah penduduk, tenaga kerja, indeks pembangunan manusia, *dependency ratio* dan *sex ratio*.

Provinsi Jambi terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota, dimana masing-masing daerah memberikan kontribusi terhadap PDRB Provinsi. Dalam aspek perekonomian, secara umum PDRB di wilayah Kabupaten cenderung lebih rendah dibandingkan dengan Kota. Dalam aspek kependudukan juga demikian, umumnya tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten lebih rendah dibandingkan dengan di Kota (Syukri, 2011 dalam Utari, dkk (2019). Terkait kepadatan penduduk ini,

terdapat beragam masalah yang ditimbulkan diantaranya penyediaan lapangan kerja, kesehatan, pendidikan serta penanganan berbagai isu sosial lainnya. Dengan penjelasan diatas, serta dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam PDRB pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, penelitian mengenai kontribusi dari faktor-faktor kependudukan pada pertumbuhan ekonomi menjadi sangat relevan untuk dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya, maka dirumuskan pada penelitian seperti berikut:

1. Bagaimana perkembangan PDRB, jumlah penduduk, kondisi tenaga kerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), *dependency ratio* dan *sex ratio* Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama periode 2010-2024?
2. Seberapa besar pengaruh jumlah penduduk, tenaga kerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), *dependency ratio*, dan *sex ratio* terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama periode 2010-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini diantaranya:

1. Menganalisis perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, kondisi tenaga kerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), *dependency ratio* dan *sex ratio* Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama periode 2010-2024.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk, tenaga kerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), *dependency ratio*, dan *sex ratio* terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama periode 2010-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dihasilkan dalam penelitian ini diantaranya:

1. **Manfaat Akademis**

Penelitian ini harapannya mampu dijadikan sumber wawasan akademik khususnya dalam bidang ilmu ekonomi, membantu memperluas perspektif teoritis yang dapat dijadikan referensi oleh peneliti pada masa mendatang.

2. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini harapannya mampu berkontribusi untuk Pemerintah Provinsi Jambi pada usaha dalam menekan pertumbuhan ekonomi, dan sebagai landasan dalam menyusun kebijakan terkait isu kependudukan.